

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN (Kasus Pembangunan Waduk Jati Gede di Sumedang Jawa Barat)¹⁾

Abstrak

Oleh :

Opan S. Suwartapradja²

Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan cukup beragam, seperti industry, infra struktur, perumahan, rumah sakit, PLTU, PLTP dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Besar kecilnya dampak dan isu yang muncul dari suatu proyek pembangunan erat kaitannya dengan jenis dan cakupan kegiatannya. Pada pembangunan bendungan area yang diperlukan lebih dari 5000 ha dan 80% milik penduduk. Jumlah penduduk yang harus pindah lebih dari 5000 KK akan kehilangan asset dan lapangan usaha. Artikel ini mendeskripsikan pemberdayaan terdampak Pembangunan Waduk Jati Gede yang berpindah ditepian waduk. Kegiatan pemberdayaan dilaksanakan melalui beberapa tahapan diawali dari pemetaan sosial, sosialisasi, pelatihan dan aplikasi.

Pemindahan terdampak pembangunan seharusnya diikuti dengan penciptaan lapangan kerja atau pemukiman kembali (*resettlement*) agar keadaan ekonominya lebih baik atau relative sama seperti semula. Penduduk yang terkena pembangunan Waduk Jati Gede 68,3% berpindah ke desa-desa ditepian waduk, sehingga meningkatkan kepadatan dan tekanan penduduk bagi desa-desa yang ditempatinya. Meningkatnya tekanan penduduk ditepian waduk ini menimbulkan dampak lingkungan terhadap proyek. Pengendalian tekanan penduduk dan dampak lingkungan terhadap proyek di tepian waduk dilakukan pemberdayaan melalui penciptaan lapangan usaha dengan mengoptimalkan potensi lokal (*lokal knowledge*) mengacu kepada konsep internalitas.

Kata Kunci : Pemberdayaan, terdampak, pembangunan, perpindahan,

-
- 1) Academic Leadership Grant (ALG) Jati Gede, Pusat Studi Resettlement dan Pembangunan, Departemen Antropologi, FISIP-DRPMI-Unpad. Disampaikan pada Konferensi AAI tanggal 14-15 September 2017. Depok. Universitas Indonesia
 - 2) Pengajar pada Departemen/ Program Studi Antropologi FISIP-UNPAD

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN (Kasus Pembangunan Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat)¹⁾

Oleh :

Opan S. Suwartapradja²

I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan dilakukan di berbagai sektor. Seperti industry, perumahan, rumah sakit, transportasi dan pengadaan listrik. Pembangunan tersebut memerlukan lahan dan kemudian membebaskannya beserta tanaman dan asset penduduk yang berada di atasnya. Pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut mengandung pengertian telah terjadi alih fungsi lahan terutama lahan pertanian. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) mencatat setidaknya 187.720 ha lahan sawah beralihfungsi setiap tahunnya (Dirjen PLA, 2005). Winoto (2005) yang dikutip oleh Direktorat Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa apabila Rencana Tata Rang Wilayah (RTRW) tidak ditinjau kebalikan dari total lahan sawah 7,3 juta hanya sekitar 4,2 juta ha (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya dan sisanya yaitu 3,1 juta ha terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

Seperti halnya dikemukakan Soemarwoto (2004), dari segi fisik pembangunan telah mengganggu lingkungan dan atau habitat tempat hidup dan berkembangbiaknya hewan-hewan yang berada di dalamnya. Dari segi sosial, hilangnya lahan terutama lahan pertanian sebagai sumber penghidupan petani luas kepemilikannya semakin berkurang dan buruh tani kehilangan lapangan usaha. Permasalahan ini kemudian diperberat lagi dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, sehingga akan menimbulkan tekanan penduduk terhadap lahan. Berkurang atau hilangnya asset penduduk sebagai sumber penghidupannya dan terus bertambahnya jumlah penduduk baik secara alamiah maupun

³⁾ Academic Leadership Grant (ALG) Jati Gede, Pusat Studi Resettlement dan Pembangunan, Departemen Antropologi, FISIP-DRPMI-Unpad. Disampaikan pada Konferensi AAI tanggal 14-15 September 2017. Depok. Universitas Indonesia

⁴⁾ Pengajar pada Departemen/ Program Studi Antropologi FISIP-UNPAD

non-alamiah akan menimbulkan tekanan penduduk terhadap lahan pada desa-desa tempat mereka bermukim.

Terdampak pembangunan yang jumlahnya cukup besar adalah pada pembangunan bendungan atau waduk. Jumlah penduduk yang harus pindah karena pembangunan bendungan baik untuk pengadaan listrik, irigasi maupun pengadaan air minum disetiap negara jumlahnya cukup besar yaitu berkisar antara 40.000 jiwa sampai dengan 1,2 juta jiwa (Goldsmith, Edward dan Nicholas Hildiyard, 1993). Pada pembangunan PLTA di negara kita, seperti di Jawa Barat PLTA Saguling sebanyak 25.000 jiwa, PLTA Cirata sebanyak 30.000 jiwa dan PWS Jati Gede sebanyak 30.000 jiwa (PPSDAL-LPPM-Unpad, 1981, 1982 dan 1985). Mereka ini tidak hanya kehilangan lahan akan tetapi juga harus pindah. Berpindahnya mereka ditempat yang baru tidak hanya harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya akan tetapi juga berdampak bagi daerah setempat yaitu menimbulkan tekanan penduduk. Desa-desa yang berada di tepian waduk yang ditempati oleh pindahan terdampak pembangunan ini luas lahan yang menjadi sumber penghidupannya semakin berkurang, sehingga akan terjadi persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan.

Artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan terdampak pembangunan, khususnya terdampak Pembangunan Waduk Serbaguna (PWS) Jati Gede setelah penggenangan. Hal ini menarik untuk diketahui tentang kehidupan mereka setelah penggenangan. Data yang dipergunakan merupakan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh Academic Leadership Grant (ALG) Jati Gede Pusat Studi Resettlement dan Pembangunan Departemen Antropologi FISIP-DRPMI-Unpad pada tahun 2016. Dari hasil pemetaan diketahui potensi SDM tentang pekerjaan dan jenis-jenis pelatihan yang diminati dan potensial untuk dikembangkan oleh terdampak pembangunan dan yang semestinya dilakukan bagi terdampak pembangunan.

II. RUJUKAN

Konsep-konsep yang terkait dengan topik dari artikel ini dimaksudkan sebagai rujukan dalam mengkaji suatu permasalahan berdasarkan temuan lapangan. **Beberapa** konsep yang terpaut dengan pemberdayaan bagi terdampak pembangunan, yaitu

pembangunan berkelanjutan, resettlement, pemberdayaan, dan internalitas (*lokal knowledge*).

2.1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mengemuka sejak tahun 1980-an. Hal ini kemudian diapresiasi oleh pemerintah dengan keluarnya Undang-undang no. 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan atau revisi dan yang terakhir menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 dalam Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kemudian komisi sedunia untuk lingkungan dan pembangunan (World Commission on Environmental and Development, WCED, 1987 dalam Soemarwoto, 2004) mengkonsepsikan pembangunan berkelanjutan usaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa menguragi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Makna dari pembangunan berkelanjutan yaitu : i) ekologi (*environmentally sound*); ii) ekonomi (*economically viable*); iii) sosial (*socially acceptable*). Menurut Soemarwoto (2004), ketiga variable tersebut saja tidak cukup, akan tetapi harus dilengkapi dengan etika. Etika dimaksudkan adalah kepedulian, dalam hal ini adalah adanya kepedulian dari pelaku pembangunan terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk memenuhi aspirasi bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.

Tercapainya pembangunan berkelanjutan tidak hanya dari aspek fisik saja yaitu tidak terjadinya kerusakan pada ekosistem tempat kita hidup, akan tetapi juga harus ada keseimbangan sosial ekonomi antar negara dan antar kelompok dalam suatu negara (Soemarwoto, 2004: 162). Ini artinya harus ada pemerataan agar tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi antara negara maju dan berkembang dan atau kesenjangan kaya dan miskin harus dikurangi. Pembangunan berkelanjutan dalam artikel ini dikonsepsikan secara

sederhana yaitu bahwa kondisi sosial ekonomi terdampak pembangunan menjadi lebih baik atau relative sama seperti semula.

2.2. Pemukiman Kembali (resettlement)

Soemarwoto (2004) mengkonsepsikan bahwa pemukiman kembali adalah pemindahan penduduk dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja. Suwartapradja (2016) mengkonsepsikan bahwa pemukiman kembali sebagai suatu kegiatan pemindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain baik secara individual maupun secara kolektif dibarengi dengan penciptaan lapangan usaha. Kegiatan tersebut tentunya tidak lepas dari peran pemerintah untuk memfasilitasinya dengan tujuan yang dipindahkan dapat memulihkan kembali ekonomi rumah tangganya agar lebih baik atau relatif sama seperti sebelum pindah. Konsep ini mengemuka berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang membangun bendungan bahwa terdampak pembangunan keadaan ekonominya tidak menjadi lebih baik (Bank Dunia, 1986 dalam Goldsmith, Edward dan Nicholas Hildiyard, 1993, Soemarwoto, 1988;). Terdampak pembangunan sebagian besar sebagai petani yang mengandalkan kehidupannya dari sektor pertanian dan kepindahannya memilih daerah-daerah pertanian di sekitar waduk. Kepindahan terdampak pembangunan bendungan dari beberapa hasil penelitian, seperti PPSDAL-LPPM-UNPAD (1982 dan 1985) terdampak pembangunan PLTA Saguling dan PLTA Cirata di Jawa Barat masing-masing 54% dan 56% pindah disekitr genangan. Begitupula hasil penelitian ALG Jati Gede DRPMI Unpad (2016) bagi terdampak Pembangunan Waduk Serbaguna (PWS) Jati Gede sebanyak 68,3% pindah di tepian waduk. Meningkatnya jumlah penduduk disekitar waduk akan meningkatkan kepadatan dan atau tekanan penduduk, persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin ketat, harga lahan meningkat dan luas pemilikan lahanpun semakin sempit. Semakin menyempitnya pemilikan lahan akan terjadi eksploitasi lahan yang intensif akan meningkatkan erosi yang akan menjadi ancaman bagi pembangunan itu sendiri. (Goldsmith, Edward dan Nicholas Hildiyard, 1993). Pada kondisi seperti ini terdampak pembangunan tidak akan mampu dapat memulihkan kembali kondisi ekonominya berdasarkan kemampuan (*skill*) dan pemilikan sumber daya lahan yang semakin sempit, sehingga menjadi pertimbangan Bank Dunia dan menjadi prasyarat bagi negara-negara

kreditur yang membangun bendungan (Bank Dunia, 1986, dalam Goldsmith, Edward dan Nicholas Hildiyard, 1993).

Lebih lanjut, Soemarwoto (1988) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemukiman kembali bukan hanya memindahkan penduduk ke daerah transmigrasi akan tetapi juga dapat dilakukan di sekitar proyek pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja. Pemindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain tanpa adanya penciptaan lapangan kerja hanya memindahkan masalah saja. Kemudian Goldsmith, Edward dan Nicholas Hildiyard, (1993) menyatakan bahwa program pemindahan berdampak pembangunan yang dilaksanakan oleh negara yang membangun bendungan selalu menemui kegagalan baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Dari segi ekonomi tingkat ekonomi terdampak tidak menjadi lebih baik dari semula, dari segi sosial telah menghilangkan tatanan sosial dalam kehidupan mereka dan dari segi budaya hilangnya sistem nilai, norma-norma dan aturan-aturan dalam kehidupan suatu komunitas. Aspek-aspek tersebut kurang mendapatkan perhatian dari agen pembangunan, sehingga keadaan ekonomi yang terkena pembangunan tidak menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Goldsmith dan Nicholas Hildiyard (1993) dalam bukunya yang berjudul Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa (Terjemahan, Kuswara, 1993 : xv) menyatakan bahwa pembangunan bendungan sering mengabaikan aspek sosial dan pemukiman kembali selalu gagal, sehingga berkesimpulan, sebaiknya sama sekali tidak membangun bendungan-bendungan besar.

2.3. Internalitas (*lokal knowledge*) dan eksternalitas

Internalitas. Internalitas dikonsepsikan suatu upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat terpenuhi dari daerah setempat. Ini artinya bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi lokal berdasarkan sumber daya yang ada, baik dari segi fisik maupun sosial. Dari segi fisik mengolah dan atau memanfaatkan sumber daya alam setempat secara optimal dapat dilakukan berdasarkan budaya lokal yang selama ini selalu memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Pengetahuan lokal dengan memanfaatkan sumber daya lahan melalui diversifikasi tanaman akan menghasilkan keragaman jenis-jenis makanan dan bahkan dapat menghasilkan suatu jenis makanan tertentu yang menjadi primadona atau kekhasan daerah setempat. Sarana produksi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan jenis-jenis tanaman tadi misalnya, dapat dihasilkan

dari daerah setempat. Potensi ini sebetulnya merupakan modal sosial bagi masyarakat perdesaan. Ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya lahan. Tetapi kemudian budaya ini terdapat kecenderungan ditinggalkan oleh generasi berikut dan kemudian beralih memanfaatkan hasil-hasil teknologi modern. Potensi lokal yang ditinggalkan tersebut sampai dengan sekarang masih sangat mungkin dapat dihidupkan dan dikembangkan kembali, yaitu dengan cara mengubah pola pikir masyarakat yang terkontaminasi oleh teknologi modern beralih kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Sebagai contoh, petani pemilik yang juga biasanya memiliki ternak (domba, sapi), kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman pertaniannya. Bagi petani yang memiliki sapi misalnya, kotorannya dapat dipergunakan sebagai media untuk menghasilkan biogas, sehingga kebutuhan untuk memasak tidak perlu membeli dan atau didatangkan dari luar daerah.

Potensi sumber daya manusia (SDM) seperti pengetahuan, keakhlian, kebersamaan, ketaatan dan kejujuran sebagai modal sosial (*sosial kapital*), merupakan suatu potensi untuk dikembangkan. Disadari bahwa modal sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat di perdesaan secara ekonomi tidak selalu membawa keberuntungan. Terkadang mereka mempunyai keakhlian atau keterampilan (*skill*) tetapi tidak dapat mengembangkannya karena terkendala kapital. Mereka lebih memilih dan melakukan kegiatan apa adanya, seperti berburuh. Bagi buruh tani misalnya, sekalipun ia mempunyai keterampilan tertentu, berburuh dianggap sebagai suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Budaya atau kebiasaan berburuh ini menjadi suatu pilihan utama daripada mengembangkan keakhlian atau keterampilan yang dimilikinya. Kondisi seperti ini memposisikan mereka berada pada kondisi ekonomi jalan di tempat, sehingga ekonomi rumah tangganya kurang beruntung. Disadari bahwa mengubah pola pikir itu tidak mudah, akan tetapi pengetahuan lokal yang dikategorikan sebagai modal sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat bukan berarti tidak dapat dikembangkan, akan tetapi dalam pengembangannya diperlukan adanya rekayasa sosial dalam memberdayakan mereka untuk dapat hidup sejahtera yang menjadi cita-cita bangsa ini.

Eksternalitas. Eksternalitas dapat diartikan sebagai suatu ketergantungan terhadap produk-produk yang dihasilkan dari luar daerah. Barang-barang yang diproduksi dari luar daerah

ini kemudian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat. Masyarakat yang selalu mengandalkan produksi dari luar daerah ini dapat menumbuhkan ketergantungan pada suatu produk tertentu yang sebetulnya dapat dipenuhi atau diproduksi di daerah setempat. Sebagai contoh, pupuk an-organik. Pupuk ini dapat digantikan dengan pupuk organik. Pupuk ini sangat ramah lingkungan dan mempunyai unsur-unsur kearifan lokal yaitu dapat mengemburkan dan atau menyuburkan tanah, sehingga unsur-unsur hara yang terkandung di dalamnya akan tergantikan kembali, sehingga tanah tetap subur. Pengetahuan lokal seperti ini, kemudian mulai memudar dan beralih mempergunakan pupuk buatan sebagai hasil teknologi modern. Namun demikian, tentunya tidak semua masyarakat petani di perdesaan mengalami perubahan seperti ini, akan tetapi masih terdapat yang bercocoktanam berdasarkan pengetahuan lokal.

2.4. Pemberdayaan

Kita sering mendengar istilah pemberdayaan dan bahkan istilah ini telah lama digulirkan oleh pemerintah, yaitu sejak tahun 1980-an di era pemerintahan Orde Baru (ORBA) dan kemudian berkembang di era reformasi sekarang ini. Konsep tentang pemberdayaan ini dimulai dari yang bersifat praktis dan kemudian tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian akademik. Beberapa konsep yang kami pilah dan dianggap relevan dengan tulisan ini mengacu kepada beberapa pendapat yang dikonsepsikan oleh akademisi.

Twelvetrees dalam Suharto (2009) mengkonsepsikan pemberdayaan masyarakat yaitu suatu upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan. Pranarka (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan suatu upaya membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Awangdana (2009) kemudian tidak hanya terkait dengan konsep akan tetapi juga terkait dengan tujuannya. Secara konseptual ia mengkonsepsikan pemberdayaan masyarakat suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Tujuannya ialah : i)

mengembangkan kemampuan masyarakat seperti kemampuan untuk berusaha, mencari informasi, mengelola kegiatan dan kemampuan lain sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi; ii) mengubah perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; iii) mengorganisasikan masyarakat dalam upaya untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan

Lebih lanjut, Kartasasmita (1996), mengemukakan bahwa upaya dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yaitu : i) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; ii) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowerment*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*in put*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Upaya yang pokok adalah taraf peningkatan pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar; iii) memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah bertambah lemah. Melindungi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Dari beberapa konsep di atas, sasaran pokok dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini senada dengan konsep yang dikemukakan (Sumodiningrat, 1999) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ditingkat bawah dan menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, berkembangnya kapasitas masyarakat di daerah perdesaan dan berkembangnya kelembagaan masyarakat. Namun pemberdayaan itu tidak hanya secara konseptual, harus diikuti dengan strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, seperti dikemukakan

Whrihatnolo dan Dwidjowijoto, (2007). mengemukakan bahwa strategi yang harus dilakukan meliputi : i) pembentukan kelompok masyarakat; ii) melibatkan fasilitator; iii) membentuk forum diskusi/musrenbang; iv) menyusun dokumen rencana umum; v) melibatkan pemerintah setempat; vi) melibatkan dunia usaha dan vii) menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat.

Pendapat lainya, seperti dikemukakan Ife (1996) dalam Suharto (2004), bahwa strategi saja tidak cukup akan tetapi harus diikuti dengan pendampingan. Pendampingan dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Peran pendamping menurutnya yaitu adanya : i) fasilitator : pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan; ii) pendidik, sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya; iii) perwakilan masyarakat, interaksi para pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat yang didampinginya; iv) peran-peran teknis yang mengacu kepada keterampilan yang bersifat praktis.

Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat Bappenas (2000) mengemukakan beberapa indikator yaitu : i) kemandirian (masyarakat terlibat secara aktif dalam suatu program); ii) keterlibatan masyarakat secara aktif dalam program tersebut; iii) komitmen dari berbagai pihak untuk menjalankan program dari masyarakat dan pemerintah; iv) pendampingan yang berkesinambungan dan v) bantuan dari donor dalam pelaksanaan program yang tidak mungkin dibantu pemerintah.

Dari uraian diatas secara sederhana konsep pemberdayaan masyarakat yang diaksudkan dalam tulisan ini adalah membantu meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi daerah dan atau pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat (*lokal knowledge*). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat itu sendiri dapat dikaitkan dengan beberapa kriteria, yaitu i) adanya partisipasi masyarakat; ii) melakukan pendampingan dan atau pemantauan (monev); iii) terdapat pengelola yang melakukan suatu kegiatan; iv) adanya koordinasi antara anggota dan atau antar kelompok; v) adanya suatu hak pemanfaatan; vi) pilihan dari suatu jenis kegiatan atau usaha dan vii) terciptanya pasar untuk menjual hasil-hasil kegiatan usahanya.

III. PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Pembangunan memerlukan lahan dan merubah lingkungan, tetapi pembangunan harus terus dilaksanakan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Pembangunan yang memerlukan lahan, lahan tentunya akan semakin berkurang dan habitat kehidupan kita terganggu (Soemarwoto, 2004). Masalahnya adalah pembangunan harus terus berlanjut dan habitat tempat kita hidup tidak terganggu. Untuk mencapai keseimbangan agar pembangunan terus berlanjut atau berkelanjutan (*sustain*) dan lingkungan tidak rusak kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Seperti dikemukakan di atas bahwa pembangunan dilaksanakan diberbagai sektor, seperti industry, perumahan, rumah sakit, transportasi dan pengadaan listrik. Pembangunan bendungan atau waduk dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan listrik sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), irigasi dan air minum. Namun, karakteristik pembangunan bendungan ini berbeda dengan pembangunan lainnya, seperti PLTU atau PLTP. Pembangunan PLTP misalnya, berada di kawasan hutan, status lahan yang dipergunakan milik pemerintah dan daerahnya merupakan hutan dan atau hutan lindung yang padat dengan tumbuhan serta merupakan habitat bagi tumbuh dan berkembangnya hewan liar. Penduduk yang bermukim didaerah seperti ini dapat dikatakan tidak ada dan sekalipun ada jumlahnya tidak banyak dan mereka bermukim di luar hutan lindung, sehingga isu pokok (*main issue*) pada pembangunan PLTP ini adalah aspek fisik yaitu biologi.

Berbeda dengan pembangunan PLTP atau pembangunan lainnya. Pembangunan bendungan atau waduk, misalnya di Jawa Barat terdapat PLTA Saguling dan PLTA Cirata, memerlukan area yang cukup luas yaitu lebih dari 4000 ha. Lahan yang diperlukan merupakan lahan milik sekitar 80% dan sisanya yaitu sekitar 20% lahan kehutanan milik pemerintah (Dinas Kehutanan). Lahan milik tersebut merupakan sumber penghidupan

penduduk dan di atas lahan tersebut terdapat permukiman mereka dengan jumlah lebih dari 30.000 jiwa. Mereka ini kehilangan asetnya dan harus pindah. Pada PLTA Saguling penduduk (KK) yang pindah dan bermukim di tepian waduk sebanyak 54% dan pada PLTA Cirata sebanyak 57%. (PPSDAL-LP-UNPAD, 1982 dan 1983).

Pembangunan Waduk Jati Gede dimulai sejak tahun 1981, dengan Surat Keputusan Gubernur KDH T I Jawa Barat No. 593.82/SK.1266-Pem.Um/81, tanggal 16 September 1981 tentang penerbitan ijin pembebasan tanah Jati Gede. Luas area yang harus dibebaskan sekitar 4.896,22 ha. Dari jumlah tersebut sekitar 2500 ha (51%) merupakan lahan basah, yaitu persawahan sebagai sumber penghidupan petani. Jumlah penduduk yang terkena Pembangunan Waduk Jati Gede berdasarkan data sensus yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) kini berubah nama menjadi Direktorat Riset Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI) Universitas Padjadjaran tahun 2004 berjumlah sebanyak 5.686 KK (Tabel 1). Mereka ini kehilangan lahan dan harus pindah. Pembebasan lahan atau ganti rugi terhadap aset penduduk cukup lama dilakukan dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2007 atau selama sekitar 25 tahun. Pelaksanaan pembebasan lahan selama itu tersendat-sendat terkendala biaya yang bersumber dari APBN. Begitupula dengan pemindahannya tidak kontinyu. Pемindahan penduduk dilakukan melalui program transmigrasi dan translok dari sejak tahun 1982-1995.

Program pemindahan tersebut dianggap lebih baik dari pemindahan penduduk pada PLTA Saguling dan PLT Cirata. Namun kemudian terhenti atau tidak berlanjut dan penduduk berpendapat bahwa pmbangunan tidak akan dilanjutkan, sehingga mereka pulang kembali ke desa semula. Di desa asalnya itu tidak mempunyai aset karena sudah diganti rugi tetapi masih bisa menggarapnya, sehingga masih dapat bertahan hidup. Begitupula bagi penduduk yang belum pindah yaitu sekitar 80% beranggapan masih dapat menggarap lahannya yang telah diganti rugi, sekalipun terdapat sebagian dari mereka yang telah mempersiapkan kepindahannya dengan membeli lahan di luar rencana genangan. Bagi golongan menengah yang telah membeli lahan untuk persiapan kepindahannya di luar rencana genangan di jual kembali dipergunakan untuk biaya anak sekolah dengan anggapan pembangunan Waduk Jati Gede tidak akan jadi. Pada kondisi seperti ini, kemudian mereka diharuskan untuk pindah dan kepindahannya tidak dimukimkan oleh pemerintah. Mereka

pindah sendiri-sendiri secara serentak dalam kurun waktu 3-4 bulan. Pada kondisi seperti ini kiranya sulit untuk dapat mempersiapkan masa

Tabel : 1. Jumlah Kepala Keluarga (KK) berdasarkan daerah Sebelum Penggenangan

No.	Kecamatan	Desa	Status daerah	Jumlah KK
1.	Jatigede	Sukakersa	Tergenang Seluruhnya	411
		Jemah*	Tergenang Sebagian	201
		Ciranggem*	Tergenang Sebagian	175
		Mekarasih*	Tergenang Sebagian	11
	Sub Jumlah	4	1/3*	798
2.	Wado	Padajaya	Tergenang Seluruhnya	690
		Wado*	Tergenang Sebagian	796
		Cisurat*	Tergenang Sebagian	379
	Sub jumlah	3	2/1*	1865
3.	Batununggal	Pawenang	Tergenang Sebagian	61
		Sirnasari	Tergenang Sebagian	141
	Sub Jumlah	2	0/2*	202
4.	Darmaraja	Cipaku	Tergenang Seluruhnya	481
		Pakualam	Tergenang Seluruhnya	381
		Karang Pakuan*	Tergenang Sebagian	29
		Cibogo	Tergenang Seluruhnya	735
		Sukaratu*	Tergenang Sebagian	67
		Jatibungur	Tergenang Seluruhnya	364
		Leuwihideung	Tergenang Seluruhnya	414
		Sukamenak	Tergenang Seluruhnya	350
	SubJumlah	8	6/2*	2821
Total Kecamatan 4		17	9/8*	5.686

Sumber : PPSDAL, 2004

Keterangan : *) Desa yang tergenang sebagian

depannya di tempat yang baru. Dampak pembangunan bendungan juga dirasakan langsung oleh kaum buruh tani. Mereka tidak memiliki lahan dan hanya mengandalkan dari berburuh kini lapangan usaha mereka hilang, sehingga mereka mendapatkan kesulitan untuk dapat bekerja dan atau untuk dapat bertahan hidup. Status proyek yang tersendat-sendat dalam waktu yang cukup lama, area yang diperlukan cukup luas, dan sebagian besar merupakan lahan pertanian, pemindahan penduduk yang tersendat dan kemudin tidak difasilitasi suatu proses terjadinya kemiskinan bagi terdampak pembangunan (Suwartapradja, 2017a).

Penggenangan Waduk Jati Gede dilaksanakan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015. Setahun setelah penggenangan yaitu pada bulan Agustus 2016 tim Academic Leadership Grant (ALG) Jati Gede Pusat Studi Resettlemen dan Pembangunan Departemen Antropologi FISIP-DRPMI-UNPAD melakukan pemetaan sosial melalui sensus terhadap penduduk yang pindah ke tepian waduk. Kriteria desa-desa tepian waduk yaitu desa-desa yang berbatasan langsung dengan waduk Jati Gede dan menimbulkan dampak lingkungan terhadap waduk. Berdasarkan hasil sensus tersebut penduduk yang bermukim di tepian waduk Jati Gede berjumlah 3.886 KK (68,3%). Mereka menetap di 4 kecamatan, 20 desa dan 54 kampung atau dusun seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel : 2. Jumlah kepala keluarga (KK) yang pindah disekitar genangan

No.	Kecamatan	Desa	Kampung	Jumlah (KK)	%
1	Darmaraja	11	25	2.099	54,0
2	Wado	5	15	1.070	27,5
3	Jatinunggal	2	8	381	9,8
4	Jati Gede	2	6	336	8,6
	Jumlah	20	54	3.886	100

Sumber : Sensus ALG Jati Gede Agustus-September 2016

Perpindahan terjadi menjelang penggenangan setelah mereka mendapatkan uang karohiman yang diberikan pemerintah, yaitu sebesar 122 juta bagi mereka yang mendapatkan ganti rugi pada tahun 1982-1986 dan 29 juta bagi mereka yang memperoleh ganti rugi tahun 1995-2000. Uang tersebut dalam ketentuannya diperuntukan bagi pembongkaran rumah, pengangkutan atau perpindahan, jaminan hidup selama 6 bulan dan untuk kontrakan rumah selama 6 bulan. Terlepas dari perbedaan dan besar atau kecilnya uang karohiman tersebut sebagian besar dari mereka manfaatkannya untuk membangun rumah. Membangun rumah rata-rata menghabiskan biaya 100 juta, sehingga bagi mereka yang menerima uang karohiman pada tahun 1995 hingga tahun 2000 lebih banyak yang tidak mencukupi. Untuk menutupi kekurang tersebut terutama bagi golongan menengah ke bawah menjual asetnya dan atau meminjam kepada saudara atau kerabatnya. Ini artinya, tabungan untuk bekal selama merintis ekonominya habis dialokasikan untuk membangun rumah. Permasalahan lain yang dihadapi bagi golongan menengah ke bawah ini yang semula menjadi petani gurem dan buruh tani, tidak mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan. Pekerjaan sebelum penggenangan menggarap lahan, kini tidak mempunyai lahan lagi. Bagi buruh tani yang biasa dilakukan bersama patron “terputus” karena berpisah perbedaan pilihan daerah kepindahan. Enam bulan setelah penggenangan mereka mendapatkan “raskin”, tetapi setelah tidak lagi mendapatkan raskin karena jaminannya sudah habis, mereka kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi seperti ini memberikan gambaran bahwa kondisi ekonomi terdampak pembangunan pada tahun pertama dan tahun kedua setelah penggenangan kurang beruntung atau menurun.

IV. ADAPTASI TERDAMPAK PEMBANGUNAN

Berpindahnya ke tempat yang baru disekitar tepian waduk sekalipun masih dalam kategori tetangga desa dalam artian masih dalam lingkup budaya yang sama mereka harus menyesuaikan dengan penduduk desa setempat. Pada tahun pertama setelah penggenangan dalam kondisi yang masih “tidak menentu” karena disibukan dengan pembangunan rumah, memikirkan bagaimana untuk dapat menyelesaikan

rumah dan memikirkan untuk dapat bertahan hidup atau pekerjaan apa yang harus dilakukannya, hubungan-hubungan sosial dengan penduduk setempat belum terjalin dengan baik. Letak rumah yang mengelompok dan jauh dari penduduk setempat dan aksesibilitas yang kurang memadai menjadi kendala untuk mengeratkan hubungan dengan penduduk setempat. Namun demikian berbaur dengan penduduk setempat bukan berarti tidak dapat dilakukan dan tidak dapat diterima. Membaurkan diri dengan penduduk setempat diawali dengan saling tegur sapa dan anjang sono, sehingga hubungan-hubungan sosial diantara keduanya semakin meningkat.

Suatu hal yang menarik dan barangkali menjadi perhatian bersama adalah terbatasnya kesempatan kerja. Keterbatasan keterampilan atau keakhlian, lahan pertanian yang semakin sempit, ketatnya persaingan untuk menjadi buruh tani merupakan suatu kendala untuk dapat mempertahankan dan atau memulihkan kebalik ekonomi rumah tangganya. Berkurangnya luas lahan pertanian karena tergenang dan tersedianya buruh tani di daerah tempat tinggalnya tidak dapat dipungkiri bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan. Munculnya sumber daya air juga tidak merupakan suatu jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan beralih pekerjaan ke sektor perikanan. Keakhlian yang tidak dimiliki, kapital yang terbatas dan kekhawatiran rasa takut tenggelam suatu pertimbangan bahwa potensi tersebut tidak dapat mereka akses karena tidak sesuai dengan keakhlian yang dimilikinya. Mereka yang tidak dapat mengakses potensi tersebut merupakan sebagian besar dari terdampak pembangunan. Seperti, perikanan tangkap (jarring dan memancing) dan transportasi air. Bagi sebagian kecil dari mereka memungut tutup dan menjadi pemulung limbah plastik. Begitupula dibidang perdagangan dan peluang-peluang usaha yang muncul setelah penggenangan tidak dapat mereka lakukan karena memerlukan keakhlian dan modal usaha.

V. PEMBERDAYAAN TERDAMPAK PEMBANGUNAN

Menyimak permasalahan yang dihadapi terdampak pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya perlu adanya terobosan agar mereka dapat bertahan hidup. Upaya-upaya yang dilakukan tentunya mengacu kepada potensi sumber daya

alam (SDA) dan sumber daya manusianya (SDM). Dalam hal ini disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki dan bidang pekerjaan yang biasa dilakukan sebelumnya. Keterbatasan kemampuan dan keahlian seperti inilah kemudian munculah suatu gagasan pemikiran untuk mengembangkan agribisnis. Pengembangan agribisnis ini mengacu kepada konsep inernalitas yaitu memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan lokal (*lokal knowledge*).

Tujuan dari pemberdayaan terdampak pembangunan ini, sederhana saja yaitu untuk mencapai penghasilan setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu sebesar Rp. 2,5 juta/KK/bulan. Namun untuk mencapai sasaran tersebut tidak mudah terkait dengan teknis, yaitu memerlukan waktu yang tidak pendek, keuletan dan ketekunan dari warga masyarakat terdampak, kejujuran, kepedulian dari pemerintah dan atau kerjasama dari unsur-unsur terkait. Kepedulian dari pemerintah dan atau unsur terkait dimaksud adalah program-program tahunan diarahkan dan atau dialokasikan bagi terdampak pembangunan. Upaya meulihkan kembali ekonomi rumah tangga terdampak pembangunan tidak cukup dengan memberikan bantuan modal usaha saja, akan tetapi harus dibarengi dengan pengawasan dan pendampingan dan atau monitoring dan evaluasi (monev).

Langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh ALG Jati Gede ini adalah : i). Pemetaan sosial; ii) sosialisasi; iii) seleksi calon pelatihan; iv) peletihan; v) aplikasi; vi) pengawasan dan pendampingan dan vii) monitoring dan evaluasi

Pemetaan soial. Pemetaan sosial dimaksudkan untuk mengetahui potensi SDM yang dapat ditindaklanjuti dan atau dikembangkan. Untuk mengetahui potensi SDM tersebut, kemudian mengidentifikasi terdampak pembangunan setelah penggenanngan dengan mempergunakan kuesioner. Dalam hal ini adalah menelusuri keberadaan mereka yang bermukim di desa-desa tepian waduk yang diasumsikan menimbulkan dampak terhadap proyek atau waduk. Pencatatan dilaksanakan oleh tim ALG Jati Gede Pusat Studi Resettlement Departemen Anropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Direktorat Riset Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi Universitas Padjadjaran dengan melibatkan 23 orang mahasiswa antropologi Fisip-Unpad dengan cara sensus. Sebelum pencatatan dilaksanakan, mahasiswa bersama Dosen

(supervisor) mendatangi kepala desa di kantor desa untuk mencari informasi awal tentang keberadaan terdampak pindahan dan kemudian mendatangi kepala dusun (Kadus), ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT). Setelah mendapatkan nama-nama kemudian supervisor dan mahasiswa melakukan wawancara dengan mendatangi rumah-rumah terdampak pindahan. Pada rumah penduduk yang telah disensus kemudian ditemplei stiker yang bertuliskan Sensus ALG Jati Gede Unpad 2016, sebagai tanda telah dilakukan sensus untuk menghindari pengulangan pencatatan.

Dari data yang terhimpun, kemudian dilakukan pemilahan dan atau pengelompokan terutama terkait dengan jenis-jenis pelatihan yang diminati. Berdasarkan peminatan dan potensi daerah kemudian dibuatkan zonasi, sehingga dapat diketahui potensi pengembangan yang dapat dilakukan berdasarkan daerah.

Sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan menjelang pelatihan. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan atau rencana-rencana serta tanggapan dari aparat dan atau warga masyarakat. Sosialisasi seperti ini, juga dapat dikategorikan sebagai suatu pendekatan atau langkah awal ketika tinjauan akan melakukan suatu kegiatan bersama masyarakat. Sosialisasi sebetulnya tidak harus dilakukan di kantor desa akan tetapi juga dapat dilakukan di tempat lain. Pada sosialisasi ini dilakukan di kantor desa yang dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan masyarakat baik terdampak sebagai pendatang maupun penduduk setempat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial antara terdampak pembangunan yang pindah ke suatu desa dengan penduduk setempat.

Seleksi calon peserta pelatihan. Seleksi calon peserta pelatihan dimaksudkan agar program dapat berjalan dengan baik dan atau mencapai sasaran. Seleksi dilakukan berdasarkan peminatan, yaitu siapa ingin dilatih apa yang dihimpun melalui sensus. Dari hasil olah data tersebut dapat diketahui untuk jenis-jenis pelatihan yang dapat dilakukan dan dapat berbeda desa satu dengan desa lainnya. Langkah kedua adalah menyeleksi berdasarkan pengalaman yang dilakukan sebelumnya atau sebelum

perpindahan, sesuai atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sebelumnya. Langkah ketiga, setelah mengidentifikasi nama-nama peminat yang akan dilatih, kemudian disosialisasikan kembali kepada aparat desa dan terhadap beberapa orang, terkait dengan kebenarannya, keberhasilan usaha yang dilakukannya sebelum pindah dan tingkat kejujuran yang bersangkutan.

Pelatihan. Pelatihan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan atau keterampilan atau transfer of technology (TOT) terhadap terdampak pembangunan. Calon peserta kemudian diseleksi berdasarkan hasil penjarangan melalui sensus dan dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan. Mereka adalah yang sebelumnya sebagai pelaku dan atau melakukan kegiatan dan mempunyai minat untuk mengikuti pelatihan dibidangnya. Hasil seleksi ini kemudian disosialisasikan kebenarannya kepada stakeholder terutama mengenai kejujurannya untuk menghindari salah sasaran. Jumlah peserta dan jenis pelatihan yang dilakukan disesuaikan dengan peminatan serta kuota yang tersedia dan pelatihan dilaksanakan di desa tempat mereka bermukim.

Aplikasi. Hasil-hasil pelatihan tidak selalu langsung ditindaklanjuti dengan implementasinya. Sebagai contoh, suatu bentuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) tidak sedikit yang tidak langsung ditindaklanjuti. Kegiatan-kegiatan yang tidak ditindaklanjuti dan terkesan keberlanjutannya diserahkan kepada peserta sulit untuk dapat berkembang karena mereka terkendala teknis terutama modal usaha untuk memulainya. Bagi suatu kegiatan pelatihan yang langsung ditindaklanjuti dibentuklah suatu kelompok kegiatan atau usaha. Pola pembentukan kelompok, seperti kelompok tani misalnya, jumlah anggota yang diharuskan selama ini minimal 20 orang adalah suatu jumlah yang cukup besar. Kelompok-kelompok bentukan ini tidak selalu berhasil dan atau tidak bertahan lama, sering menemui kegagalan. Tidak sedikit yang tidak berhasil dan sekalipun terdapat yang bertahan yang aktif hanya beberapa orang saja yaitu seorang ketua dan tidak lebih dari 2 orang anggota.

Pola seperti ini harus ditinggalkan karena tidak sedikit dari mereka yang telah mendapatkan pelatihan tidak dapat mengaplikasikannya dan kelompok yang dibentuk tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitupula dengan pembentukan kelompok perlu dicarikan formula baru yang menuntut masing-masing anggota untuk bekerja secara aktif dan saling ketergantungan. Bentuk koloni misalnya, suatu bentuk kelompok yang dapat dikategorikan mempunyai saling ketergantungan antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Sebagai contoh, koloni budidaya itik. Pada budi daya ini meliputi 5 elemen kegiatan yaitu, pemelihara, pencari/pembuat pakan, penetas, pengolah pasca panen dan pemasar. Oleh karena itu anggotanya cukup 5 orang dan masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya. Adanya saling ketergantungan kegiatan satu dengan lainnya, menuntut mereka harus aktif dan jika satu bidang saja tidak berjalan, maka kegiatan itu akan terganggu dan dapat digantikan atau merekrut anggota yang baru. Sebaliknya pada kelompok tani, tidak demikian dan bila seorang anggota tidak aktif kemudian diikuti oleh anggota lainnya yang pada akhirnya kelompok itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Suatu hal yang menarik adalah bentuk modal usaha. Modal usaha yang berlaku selama ini dalam bentuk pinjaman dan harus mengembalikannya. Pola seperti ini akan memberatkan bagi petani sebagai orang miskin dan orang miskin tidak mungkin dapat mengembalikannya, sehingga akan menjadi beban bagi mereka. Secara konseptual suatu bentuk modal usaha adalah berupa “hibah bergulir”. Artinya, modal awal yang diberikan tidak mengandung beban harus dikembalikan, akan tetapi digulirkan kepada yang lain ketika telah mencapai sasaran. Oleh karena itu pula program pengentasan kemiskinan harus mempunyai sasaran atau target penghasilan yang harus diperoleh oleh pelaku. Bila sudah mencapai sasaran kemudian digulirkan kepada yang lainnya. Sebagai contoh budidaya ternak domba. Target sarasanya misalnya, adalah setara dengan upah minimum kabupaten (UMK) yaitu sekitar Rp. 2,5 juta/KK/bulan dan setelah itu digulirkan kepada yang lainnya. Secara konseptual hal ini bisa dilakukan dengan modal awal 10 ekor domba (9 betina, 1 pejantan) setiap orang miskin. Domba betina yang secara genetic berketurunan 2 ekor, dari 9 ekor pada tahun kedua sudah beranak sebanyak 18 ekor dan kemudian dibesarkan selama 1-2 tahun. Dengan pola ini pada akhir pemeliharaan tahun kedua atau pada awal

tahun ketiga ia sudah dapat menjual satu ekor domba seharga Rp. 2,5 juta dan kemudian induk awal sudah dapat digulirkan kepada penduduk miskin lainnya. Yang berlaku selama ini yang dilakukan oleh dinas peternakan adalah petani diberi 1-2 ekor tiap kepala keluarga dan dengan konsep ini petani tidak dapat menjual untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya yang pada akhirnya mereka menjual induknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan menggulirkannya kepada orang lain.

Pengawasan dan pendampingan. Program-program pengentasan kemiskinan seperti dipaparkan di atas melalui pemberdayaan masyarakat yang secara konseptual cukup ideal, tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa adanya pengawasan dan pendampingan. Faktor ini dapat menentukan keberhasilan terutama terhadap program yang terukur dan terencana serta mempunyai sasaran atau target yang realistis. Pengawasan dan pendampingan ini dilakukan dari sejak awal kegiatan, tidak hanya terkait dengan cara produksi dan distribusinya, akan tetapi juga terkait dengan keberhasilan yang bersangkutan, yaitu dapat hidup mandiri dan atau mendapatkan penghasilan tetap bulanan setara dengan UMK. Pengawasan diawali dari cara produksi, pemasaran dan pemanfaatan hasil dan pendampingan dilakukan sampai dengan mandiri dan perguliran modal usaha. Dan begitu seterusnya, sehingga program pemberdayaan sebetulnya memerlukan waktu yang panjang yaitu 3-4 tahun, sesuai dengan jenis usaha yang dilakukannya.

Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atau disingkat monev adalah dua kegiatan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pengawasan dan pendampingan. Kegiatan ini mengandung pengertian memantau kegiatan atau program terhadap perkembangan ekonomi pelaku setelah program selesai. Pemantauan dapat dilakukan secara periodic sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memantau keberlanjutan (sustain) program, dan tidak menutup kemungkinan pelaku mendapatkan kesulitan, sehingga dapat membantu memecahan masalah yang dihadapi.

Begitu pula dengan evaluasi. Secara umum kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan ekonomi yang bersangkutan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survai,

sehingga hasil survai tersebut dapat memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan suatu kegiatan, sehingga dapat berkembang dengan baik.

VI. PENUTUP

Terdampak pembangunan bendungan sebelum dan setelah perpindahan dihadapkan pada kecemasan akan masa depan hidupnya di tempat yang baru. Dari segi sosial pada saat atau menjelang perpindahan berada dalam kondisi ketidakpastian, sehingga keputusan untuk pindah ke daerah pilihannya dihindangi oleh rasa kekhawatiran adanya perbedaan dengan di tempat asalnya. Dari segi ekonomi di khawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dari segi budaya tidak dapat berkumpul kembali dengan orang tua dan kerabat yang setiap saat dapat ditemuinya. Aspek yang harus dibangun kembali tidak hanya pada aspek ekonomi saja akan tetapi termasuk aspek sosial dalam menumbuhkembangkan kepercayaan diri untuk dapat bersosialisasi dan hidup eksis kembali.

Secara ekonomi dampak pembangunan tidak mempunyai modal usaha dan keterampilan yang terbatas. Pemberdayaan bagi warga masyarakat seperti ini tidak mudah dan diperlukan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, pertama, pemberdayaan pada masyarakat seperti ini diperlukan terbangunnya kerjasama antar berbagai stakeholder atau agen-agen pembangunan. Kedua, pola dan atau kegiatan dalam memulihkan kembali ekonomi mereka dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan capital yang tersedia. Ketiga, untuk mencapai keberhasilan program pada awal pemberdayaan pemilihan cuplikan seyogyanya tidak salah sasaran dengan memperhatikan modal sosial yang dimilikinya. Peserta yang terpilih dalam suatu program pemberdayaan dapat dianggap atau dikategorikan sebagai pioneer yang harus dapat mensosialisasikan dan atau menjadi motivator pada kegiatan pemberdayaan berikutnya yang pada akhirnya dapat menjadi agen pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kecermatan dalam memilih atau menentukan warga masyarakat pada awal suatu kegiatan pemberdayaan agar program dan transformasi sosial dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan (*sustainable*).

DAFTAR PUSTAKA

ALG Jati Gede.

2015. Laporan Penelitian. *Kondisi Sosial Ekonomi Sebelum Penggenangan Terdampak Pembangunan Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat*. Jatinangor. Pusat Studi Resettlement dan Pembangunan Departemen Antropologi FISIP-UNPAD.

ALG Jati Gede.

2016. Laporan Penelitian. *Pemukiman Kembali (Resettlement) Terdampak Pembangunan Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat*. Jatinangor: Pusat Studi Resettlement dan Pembangunan Departemen Antropologi FISIP-DRPMI-UNPAD.

Dirjen PLA.

2005. Dalam Muhammad Iqbal dan Sumaryanto . *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No 2. Juni 2007:167-182

Goldsmith dan Nicholas Hildyard.

1993. Terjemahan Kuswara. *Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa*.

Ife, Jim.

1996. *Community Development: Creating Community Alternatives Vision. Analysis and Practice*. Melbourne:Longman.

Kartasasmita, G.

1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Bandung: Institut Teknologi Bandung

Pranarka.

1996. <https://books.google.co.id/books?isbn=9798026470>

PPSDAL-LPPM-Unpad.

1981. *Laporan Penelitian. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Waduk Jati Gede*. Kerjasama Dinas PU Pengairan Cimanuk dan Cisanggarung. Bandung:

PPSDAL-LPPM-Unpad.

1982. *Laporan Penelitian. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PLTA Saguling*. Kerjasama PLN Pikitdro-Jabar. Bandung:

PPSDAL-LPPM-Unpad.

1985. *Laporan Penelitian. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PLTA Cirata*. Kerjasama PLN Pikitdro-Jabar. Bandung.

Solihin, D.

2007. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal*. <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/Strategi-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembangunan-ekonomi-lokal>

Suharto.

2004. *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Bahan Bacaan Pelatih dari STKS Bandung dan Departemen Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Para Pendamping Sosial keluarga Miskin pada Proyek Uji Coba Model Pemandu di Lampung, Jateng dan NTB

Soemarwoto, Otto.

2004. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta. Djambatan. Cetakan ke 10.

Soemarwoto, Otto.

1988. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta. Gama Press.

Sumodiningrat, G.

1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengman Sosial*. Jakarta: GramediaPustaka Utama.

Suwartapradja, Opan S.

2016. Makalah. *Pemukiman Kembali dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Seminar Nasional Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan, Jatinangor. IPADI, BKKBN, UNPAD, Pusat Kespro FK-UGM, 26-28 November.

Suwartapradja, Opan S.

2017a. *Orang Pinggiran yang Terpinggirkan*. Artikel. Academic Leadership Grant (ALG) Jati Gede. Jatinangor. Pusat Riset Resettlement dan Pembangunan Departemen Antropologi FISIP-DRPMI-UNPAD.

Undang-undang.

No. 32 Tahun 2009. *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Republik Indonesia.

Winoto, J.

2005. *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Implementasinya*. Makalah Seminar “Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi”, 13 Desember 2005. Kerjasama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Institut Pertanian Bogor. Jakarta.